

Capaian Hasil Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Psikologi dan Pendidikan Universitas Al Azhar Indonesia

Bahrul Ulum^{1*}, Adiyono Roebianto², Helmi Triadi¹, Siti Zahraul Maftuhah¹

¹Program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Psikologi dan Pendidikan,
Universitas Al-Azhar Indonesia,

²Program studi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Pendidikan, Universitas Al-Azhar Indonesia
Jl. Sisimangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110.

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: ibnbahrumi@gmail.com

Abstract - The MBKM programs with the right to study three semesters outside the study program aim to improve the competence of soft skills and hard skills of graduates. However, this MBKM policy raises several new problems at the grassroots level as the executor of the policy, such as problems with conversion and achievement of Intended Learning Outcomes (CPL). The purpose of this study was to find out how the MBKM policy was implemented in the Faculty of Psychology and Education, Al Azhar Indonesia University, the opportunities and problems faced by the Psychology Faculty, Al Azhar University Indonesia, in implementing the MBKM policy. This study used a descriptive qualitative method with the aim of obtaining an overview and perception of the Faculty of Psychology and Education regarding the implementation of MBKM by means of data collection techniques by observation and interviews with all study programs under the auspices of the Faculty of Psychology and Education as well as documents related to MBKM. From the results of the study it can be concluded that technically all structural officials support MBKM activities, but at the implementation stage they still face several obstacles, that are the need to adapt the curriculum to the MBKM, the difficulty of converting the MBKM program to study program courses, especially subjects that are expertise, as well as the student quota given by The Ministry of Education and Culture which is very low.

Abstrak - Program MBKM dengan hak belajar tiga semester di luar program studi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*. Namun kebijakan MBKM ini memunculkan beberapa permasalahan baru tataran bawah selaku pelaksana kebijakan tersebut seperti permasalahan konversi dan ketercapaian Capaian Profil Lulusan (CPL). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan MBKM diimplementasikan di Fakultas Psikologi dan Pendidikan Universitas Al Azhar Indonesia, peluang dan problematika yang dihadapi oleh Fakultas Psikologi, Universitas Al Azhar Indonesia, dalam mengimplementasikan kebijakan MBKM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran dan persepsi Fakultas Psikologi dan Pendidikan terhadap pengimplementasian MBKM dengan teknik pengumpulan data secara observasi dan wawancara kepada seluruh prodi yang ada di Fakultas Psikologi dan Pendidikan serta dokumen yang berkaitan dengan MBKM. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara teknis semua pejabat struktural mendukung kegiatan MBKM, namun pada tahap pengimplementasian masih menghadapi beberapa kendala yaitu perlunya adaptasi kurikulum untuk memfasilitasi MBKM, sulitnya mengkonversi program MBKM ke mata kuliah prodi terutama mata kuliah yang menjadi keahlian, serta kuota mahasiswa yang diberikan oleh Kemendikbud Ristek sangat sedikit.

Keywords - MBKM Curriculum, Opportunities and Problems, MBKM Program.

PENDAHULUAN

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), sebagaimana tertuang dalam Permendikbud No. 3, Tahun 2020 (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2020), menyebutkan bahwa diselenggarakannya MBKM bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik itu kompetensi ringan (*soft skills*) maupun kompetensi berat (*hard skills*), agar lebih siap dalam menjawab tuntutan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan perguruan tinggi sebagai calon pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkarakter. Program-program pembelajaran yang berdasarkan pengalaman (*experiential learning*) dengan cara yang fleksibel diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya (Dirjen Dikti, 2020).

Untuk merespon kebijakan Mendikbud Ristek terkait MBKM, Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) telah melakukan berbagai upaya mulai penyiapan kebijakan internal sampai perjanjian kerja sama untuk memfasilitasi mahasiswanya baik di luar Prodi dalam kampus maupun di luar kampus, bahkan UAI telah membentuk direktorat khusus untuk mengimplementasikan kebijakan MBKM. Kebijakan UAI kemudian dirumuskan dan terjemahkan di tingkat Fakultas untuk kemudian dilaksanakan oleh Prodi masing-masing di antaranya Fakultas Psikologi dan pendidikan. Namun pada pelaksanaannya, masing-masing prodi yang berada dalam Fakultas Psikologi dan Pendidikan masih mengalami kesulitan dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan kebijakan MBKM tersebut, hal ini berkaitan dengan Capaian Lulusan (CPL) Prodi yang sebagiannya tidak dapat dicapai dengan program MBKM. Selain itu, setiap Prodi harus merombak ulang kurikulum yang telah berjalan untuk disesuaikan dengan kebijakan MBKM.

Pembelajaran melalui program MBKM memberikan tantangan dan peluang kepada mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas, kreativitas, dan personaliti serta mengembangkan kemandirian hidup melalui realitas dunia kerja dan dinamika lapangan (Jati et al., 2022; Mudrikah et al., 2022). Melalui program MBKM, para mahasiswa diharapkan mampu melakukan manajemen diri, cakap dalam berinteraksi sosial, dan mampu berkolaborasi dengan baik guna mencapai target dan tujuan yang dicanangkan. Dengan diimplementasikannya MBKM di tingkat fakultas, maka penting

dilakukannya penelitian terkait kesiapan dan dukungan para pejabat struktur di tingkat ini.

Kunci keberhasilan MBKM di sebuah Perguruan Tinggi yaitu berani untuk mengubah pola pikir dari kurikulum yang berbasis konten (*content based learning*) menjadi kurikulum yang berorientasi capaian pembelajaran (*outcome based education/OBE*) yang bersifat adaptif dan fleksibel untuk mengasah mahasiswa menjadi individu yang berkari. Setiap Program Studi atau Jurusan memiliki tantangan untuk mengembangkan kurikulum yang adaptif terhadap tuntutan perkembangan zaman yang semakin pesat, namun tanpa keluar dari tujuan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Di samping itu, dalam pelaksanaan kebijakan MBKM diperlukan adanya kolaborasi dengan mitra ataupun pihak lain yang sesuai dengan bidang keilmuannya dalam mendukung capaian pembelajaran yang diharapkan (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2020).

Kebijakan MBKM di Perguruan Tinggi memberikan otonomi kepada Perguruan Tinggi untuk memilih program apa pada MBKM tersebut. Pada prinsipnya, paradigma pada pendidikan diubah agar menjadi lebih mandiri dengan budaya pembelajaran yang inovatif. Munculnya kebijakan Menteri Kemdikbud Ristek Dikti terkait MBKM pada tahun 2020 memberikan perubahan paradigma di dunia pendidikan utamanya di Perguruan Tinggi (Sopiansyah, Masruroh, Zaqiah, & Erihadiana, 2021). Konsep MBKM mengandung arti adanya kemandirian dan kemerdekaan bagi lembaga pendidikan baik di sekolah maupun perguruan tinggi (Susilawati, 2021).

Dasar hukum implementasi MBKM di perguruan tinggi adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Berdasarkan PerMen tersebut, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan terkait tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 11 (1) Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2020). Dalam pelaksanaan kurikulum MBKM dibutuhkan kerja

sama yang baik sehingga pelaksanaan kurikulum tersebut bisa berjalan dengan baik juga.

Program MBKM sendiri diharapkan menjadi *link and match* antara lulusan Perguruan Tinggi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ulum bahwa dalam mengimplementasikan MBKM di perguruan tinggi, civitas akademika perlu mewujudkan kerjasama dengan berbagai *stakeholders* seperti dunia industri dan instansi pemerintah (Ulum & Septayuda, 2022). Bahkan program MBKM juga diharapkan menjadi solusi atas kondisi masa depan yang sangat dinamis (Arifin & Muslim, 2021). Menurut Rodiyah inovasi pembelajaran harus dilakukan untuk menyiapkan mahasiswa dengan keterampilan seperti kemampuan pemecahan masalah, nalar kritis, kolaborasi dan komunikasi, serta pembelajaran yang berbasis kasus (*case study*) dan kelompok (*group project*) (Rodiyah, 2021).

Dalam implementasinya kebijakan MBKM mengalami sejumlah kendala sebagaimana disebutkan oleh (Arifin & Muslim, 2021), Maghfiroh & Sholeh (2022) diantaranya yaitu mekanisme kolaborasi antara Perguruan Tinggi Swasta dan program studi dengan pihak di luar kampus, perubahan cara pandang pada PTN untuk bersaing pada level internasional, dan mengubah tata cara magang di luar program studi.

Penelitian yang berkaitan dengan MBKM sudah dilakukan oleh sebagian peneliti meskipun kuantitasnya belum banyak karena program MBKM itu sendiri baru digagas pada tahun 2020 yang lalu, meskipun pada prakteknya program-program MBKM ini telah dilakukan oleh perguruan tinggi secara mandiri. Kebijakan MBKM dinilai kurang efektif, produktif, dan efisien karena masih terkendala dengan mekanisme pelaksanaannya di lapangan, Karena itu Menteri Dikbud Ristek dianggap belum mengakomodir saran dan masukan dari berbagai kalangan serta pentingnya melakukan kajian secara mendalam karakteristik pendidikan di Indonesia. Selain dari itu, kebijakan MBKM belum bisa dilaksanakan di sejumlah kampus secara menyeluruh karena beberapa faktor salah satu di antaranya adalah pembiayaan yang cukup besar, mengingat MBKM bukan hanya hak belajar tiga semester di luar program studi saja melainkan masih ada program-program lainnya seperti sistem akreditasi perguruan tinggi, program pembukaan studi baru, dan kebebasan menjadi PTN-BH. Bukan hal yang mudah untuk menerapkan kebijakan MBKM, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi

oleh perguruan tinggi di antaranya mekanisme kolaborasi antar perguruan tinggi dan program studi dengan instansi lain, percepatan perguruan tinggi *Go International*.

Setelah melakukan penelusuran di jurnal-jurnal online yang membahas tentang implementasi MBKM di Perguruan Tinggi, peneliti menemukan beberapa artikel ilmiah yang terbit di jurnal-jurnal online yang membahas masalah implementasi MBKM di Perguruan Tinggi.

Dalam artikel yang berjudul “*Tantangan Implementasi Kebijakan MBKM Pada Perguruan Tinggi Islam Swasta Di Indonesia*”, yang ditulis Syamsul Arifin dan Moh. Muslim (2021) membahas tentang Kebijakan MBKM dan tantangan yang akan dihadapinya terutama oleh Perguruan Tinggi Islam Swasta. Ada empat kebijakan Mendikbud yang patut diapresiasi yaitu pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, kebebasan menjadi PTN-BH, dan hak belajar tiga semester di luar program studi, namun keempat kebijakan fundamental ini dianggap akan memberikan masalah-masalah cara pengimplementasiannya di tataran bawah.

Nensi Nofa dalam artikelnya yang berjudul “*Analisis Tantangan implementasi Kebijakan MBKM Pada Perguruan Tinggi Islam Negeri Di Indonesia*” mengupas konsep MBKM dan menyimpulkan bahwa program ini telah memberikan peluang seluas-luasnya untuk mencetak mahasiswa generasi bangsa yang mampu menatap tegap dunia di masanya (Nofia, 2020). Namun demikian ia menyatakan bahwa aturan MBKM di Perguruan Tinggi Islam Negeri belum bisa diimplementasikan karena beberapa faktor di lapangan. Memang secara aturan, MBKM ini cukup bagus namun dalam pengimplementasiannya akan tidak terlaksana secara maksimal. Sedangkan dalam artikel yang berjudul “*Role Model Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Program Studi Non Agama*” yang menjelaskan dengan mengamati mahasiswa dan dosen untuk melihat bagaimana MBKM dapat dipahami oleh semua *stakeholders* untuk program studi sarjana non-agama. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa model kurikulum MBKM yang dapat diterapkan di program studi adalah model yang memiliki keterkaitan erat dengan budaya pengajaran dan pembelajaran yang ada (Syah Aji & Iswandi Putra, 2021).

Dari kajian-kajian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa masih ada kendala dalam mengimplementasikan kebijakan MBKM baik di Perguruan Tinggi Islam Swasta maupun Di Perguruan Tinggi Islam Negeri. Hal ini kemungkinan karena kajian ini dilakukan pada tahun 2020 dan 2021, sementara di tahun 2022 ini rata-rata Perguruan Tinggi sudah merespon kebijakan MBKM besutan Mendikbud, Nadiem Makarim, dengan mempersiapkan segala upaya untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan MBKM diimplementasikan di Fakultas Psikologi dan Pendidikan Universitas Al Azhar Indonesia, peluang dan problematika yang dihadapi oleh Fakultas Psikologi, Universitas Al Azhar Indonesia, dalam mengimplementasikan kebijakan MBKM. Dalam kajian apakah hasilnya akan sama dengan kajian-kajian sebelumnya ataukah sudah ada kemajuan dalam pengimplementasian kebijakan MBKM ini.

METODE

Populasi penelitian ini adalah seluruh Program Studi (Prodi) yang berada di bawah naungan Fakultas Psikologi dan Pendidikan (FPP) yaitu: Prodi Psikologi, Prodi Pendidikan Guru dan Pendidikan Anak Usia Dini (PG PAUD), Prodi Bimbingan Konseling Islam, dan Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI). Sedangkan sampel penelitian berjumlah 8 orang (delapan) yang berasal dari pejabat struktural di FPP yaitu, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan Sekprodi, Kaprodi dan Sekprodi Bimbingan Konseling, Kaprodi Psikologi, dan Sekprodi PAI.

Dalam kajian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif (deskriptif) yang bertujuan untuk memperoleh gambaran dan persepsi Fakultas Psikologi dan Pendidikan terhadap pengimplementasian MBKM dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi terhadap program studi yang ada di lingkungan Fakultas Psikologi dan Pendidikan, Universitas Al-Azhar Indonesia, serta dokumen yang berkaitan dengan MBKM. Metode penelitian kualitatif dipilih

sebab metode ini dirasa tepat untuk memberikan gambaran yang kaya dan mendalam tentang pelaksanaan program MBKM di tingkat fakultas. Hal ini juga sesuai dengan tujuan dari penelitian kualitatif bahwasannya metode kualitatif sangat bermanfaat dalam menghasilkan deskripsi tentang fenomena yang kompleks, menceritakan pengalaman dan interpretasi peristiwa oleh narasumber/informan secara langsung (Sofaer, 1999).

Data yang didapatkan kemudian diperkuat dengan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan menghadirkan perwakilan masing-masing prodi sebagai sampel utama (Kaprodi dan Sekprodi). Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi. FGD akan dilakukan satu kali kepada masing-masing Ketua Program Studi atau perwakilannya ditambah dengan Dekan dan Wakil Dekan FPP jika memungkinkan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen MBKM serta hasil FGD akan diolah dan dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan studi kualitatif, dengan metode wawancara sebagai pengumpulan datanya. Responden dalam penelitian ini sejumlah delapan orang, yang merupakan pejabat struktural di tingkat Fakultas Psikologi dan Pendidikan Universitas Al-Azhar Indonesia.

Secara umum, gambaran responden penelitian yaitu para pejabat struktural di lingkungan Fakultas Psikologi dan Pendidikan Universitas Al-Azhar Indonesia. Para responden terdiri dari empat pria dan empat Wanita. Semua responden telah menjadi pejabat struktural lebih dari satu tahun dan masa kerja setidaknya sudah tiga tahun di Universitas Al-Azhar Indonesia. Para responden telah mendampingi kegiatan MBKM sejak tahun 2020, baik sebagai dosen pembimbing maupun sebagai Kepala Program Studi atau Sekretaris Program Studi. Oleh karenanya, data hasil wawancara dirasa cukup valid dari sumber yang kredibel. Gambaran umum responden dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Responden Penelitian

	Responden							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Inisial	SF	TS	FN	AH	LM	NN	AR	NF
Usia (tahun)	36	41	59	43	46	40	31	37

Jenis Kelamin	Pria	Pria	Pria	Pria	Wanita	Wanita	Wanita	Wanita
Pendidikan Formal	S3	S3	S3	S2	S2	S2	S2	S3
Jabatan	Kaprodi	Sekprodi	Dekan	Wakil Dekan	Kaprodi	Sekprodi	Sekprodi	Kaprodi

Wawancara dilakukan secara tatap muka langsung antara pewawancara dengan responden dan secara berstruktur. Data hasil wawancara dilakukan verbatim lalu diinterpretasikan ke dalam hasil penelitian. Adapun hasil wawancara tersebut dapat dilihat dalam beberapa pembahasan.

Pengetahuan terhadap kebijakan MBKM

Implementasi MBKM dimulai dari pengetahuan para pimpinan di fakultas dan prodi-prodi di bawahnya terhadap kebijakan pemerintah tentang MBKM. Sejauh mana mereka memahami kebijakan ini sehingga dapat diimplementasikan di prodinya. Hal ini sangat penting untuk mengetahui kesiapan mereka dalam mengimplementasikan MBKM. Dalam artikel yang ditulis oleh Puspitasari & Nugroho dijelaskan bahwa “Kebijakan MBKM merupakan keputusan pemerintah untuk memperbaiki system dan cara pembelajaran di Indonesia, khususnya perguruan tinggi, agar siap dan mampu bersaing secara global terutama dalam dunia kerja” (Puspitasari & Nugroho, 2021).

Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa semua responden (100 %) dari jumlah responden yang totalnya berjumlah 8 orang dalam hal ini para pejabat struktural di tingkat fakultas dan prodi sudah mengetahui kebijakan MBKM yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek. AH, salah seorang responden mengatakan: “Untuk MBKM ini saya mengetahui dari beberapa sumber, yaitu dari universitas dan sosialisasi langsung dari Kemdikbud Ristek. Jadi jika ditanya seberapa jauh, saya tidak bisa menentukan, tapi saya rasa saya cukup tahu dengan program ini, karena dari beberapa sumber yang langsung”. Sementara itu, AR menambahkan: “Jadi kalau ditanya Seberapa jauh ya, lumayan jauh, lumayan tahu. Responden lainnya juga menyatakan bahwa mereka sudah mengetahui kebijakan MBKM.

Dari aspek pengetahuan terhadap kebijakan MBKM, para pejabat struktural di Fakultas Psikologi dan Pendidikan tidak ada kendala sama sekali, karena sosialisasi kebijakan MBKM secara masif telah disosialisasikan oleh Kemendikbud Ristek maupun oleh Perguruan Tinggi dan diberitakan oleh berbagai media dan media sosial. Perubahan kebijakan di bidang pendidikan yang dilakukan secara radikal

diharapkan mampu menjawab permasalahan pendidikan dan dunia kerja (Lhutfi & Mardiani, 2020). Kebijakan pendidikan di Indonesia yang berubah tiap ganti menteri kurang memperhatikan aspek keberlanjutan, banyaknya studi yang diambil mengganggu arah jalur studi.

Keterlibatan Pimpinan Fakultas dan Prodi Dalam Penyiapan Implementasi MBKM

Dalam mendukung kebijakan MBKM, dibutuhkan persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh FPP guna terlaksananya implementasi program MBKM. Persiapan tersebut, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana di FPP, Pejabat yang berwenang, para dosen, dan mahasiswa, maupun mitra kerja sama. Nugroho menyatakan Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2004). Perubahan yang terjadi pada kurikulum butuh penyesuaian bagi FPP untuk mengimplementasikan kebijakan MBKM, meskipun pada dasarnya sebagian program yang ada dalam MBKM seperti program pertukaran mahasiswa dalam dan luar negeri atau program magang telah dilaksanakan oleh FPP. SF menyampaikan “*Di Prodi BKI sebelumnya tidak ada, cuman kita ada magang keluar, baik di daerah Indonesia maupun di luar negeri, ini terjadi sebelum pandemi ya, nama program nya yaitu Magang Sekolah Islam Indonesia - Kuala Lumpur...kegiatan ini hampir mirip lah dengan kegiatan MBKM. Nah untuk yang magang di dalam negeri itu berada di Yogyakarta, Nah selebihnya mahasiswa yang magang di wilayah jabodetabek*”.

Mengenai keterlibatan pimpinan dalam penyiapan implementasi MBKM, responden FN menyatakan: “*Tentunya setelah mengetahui kebijakan program MBKM ini dari Kementerian dan dari Universitas, maka saya selaku dekan menginformasikan dan mensosialisasikan program ini bersama dengan prodi-prodi yang ada di bawah naungan Fakultas Psikologi dan Pendidikan*”. Senada dengan apa yang disampaikan oleh FN, NF menyampaikan: “*Dalam penyiapan implementasi MBKM yang dilakukan adalah yang pertama sosialisasi program-program MBKM kepada mahasiswa, yang kedua mendata mahasiswa yang memang lolos pada program-program tertentu, kemudian setelah itu*

biasanya ada pembekalan untuk mahasiswa-mahasiswa ya memang melakukan pertukaran mahasiswa dan lain sebagainya”.

Parsons Mengemukakan “Implementasi adalah proses yang melibatkan pihak yang melaksanakan implementasi dalam pembuatan kebijakan dan dalam menjalankannya atau melaksanakannya dari atas” (Parsons, 2005). Keterlibatan para pimpinan dalam persiapan implementasi MBKM sangat jelas, 100% dari jumlah responden menyampaikan bahwa mereka telah menyiapkan segala keperluan untuk mendukung terlaksananya kebijakan MBKM. Bahkan pada saat ini, FPP termasuk fakultas yang menerima mahasiswa MBKM *Inbound* selain daripada mahasiswanya yang *outbound*. Responden AR menegaskan bahwa “Ketika kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah, dan Kebetulan saya juga menjadi salah satu koordinator ya, koordinator dari PT MBKM di kampus sendiri untuk teknisnya seperti konversi SKS, kemudian juknis, pembuatan kurikulum, dan adaptasi kurikulum untuk transisi ke kurikulum MBKM”. Kemudahan akses ke pokja di Kemendikbud Ristek untuk berkoordinasi dalam hal teknis, sosialisasi dan evaluasi aturan MBKM secara rutin sangat diperlukan sebagai bentuk mitigasi risiko mengingat program MBKM yang beragam dan perlunya koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memfasilitasi proses operasional di lapangan (Wahyuningtyas, Isyнуwardhana, Rismayani, & Gunawan, 2022).

Dampak MBKM Terhadap pembelajaran Mahasiswa

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyani mengemukakan bahwa proses pembelajaran dalam kampus merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning*) yang sangat esensial (Sulistiyani, et al., 2022). Keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan nyata yang kompleks, keterampilan dalam menganalisis, etika profesi, dan kompetensi di bidang lain di luar program studi sangat mungkin dapat diperoleh melalui implementasi MBKM (Dirjen Dikti, 2020).

Dampak MBKM terhadap pembelajaran mahasiswa sebagaimana disampaikan oleh responden LM bahwa: *... tentu dampaknya sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena mahasiswa itu punya pengalaman di dunia kerja, karena kan kadang-kadang kalau di perguruan tinggi itu kan banyak didapatkan teori-teori.* Pernyataan LM di amini oleh SF “*Tentunya sangat berdampak sekali ya, dalam artian mereka mengambil mata kuliah yang mana*

belum ada di kampus kita ini, contohnya mereka mengambil mata kuliah kepariwisataan, nah mereka nanti belajar tentang pariwisata dan bagaimana mereka memecahkan masalah dalam kepariwisataan ini’. AH juga sepatutnya dengan pernyataan responden lainnya dan mengatakan bahwa “*program MBKM ini memberikan warna baru dalam pembentukan konstruk-keilmuan dan skill mahasiswa*”. Senada dengan AH, TS memperkuat “*Yaaa saya kira dampaknya positif, pertama mahasiswa mendapatkan wawasan diluar kampus utama, kedua banyak teman karena dia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya*”. Dari kegiatan tersebut mereka juga dapat meningkatkan kompetensinya melalui berbagai macam ilmu dan pengalaman yang telah disampaikan oleh para pemateri yang berpengalaman (Astuti, Rosiawan, & Suyitno, 2022).

Berbeda dengan responden sebelumnya, FN mengatakan bahwa “*...program MBKM ini berdampak atau tidak kepada proses pembelajaran mahasiswa maka harus diadakan penelitian dengan mewawancarai mahasiswa-mahasiswa yang pernah mengikuti kegiatan MBKM ini, baru setelah itu kita dapat mengetahui sejauh mana program MBKM ini berdampak pada proses pembelajaran mahasiswa.* Responden NF juga mengungkapkan pendapat yang mirip dan mengatakan “*dampak dari mahasiswa mengikuti program MBKM sebenarnya saya belum mengobservasi secara dalam dampaknya seperti apa yang terlihat secara langsung*”.

Dari hasil survei, 75 % dari jumlah responden meyakini bahwa program MBKM memberikan dampak positif terhadap pembelajaran mahasiswa yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Sedangkan 25 % dari responden menyebutkan bahwa dampak program MBKM masih perlu dikaji ulang dan dilakukan penelitian terhadap para mahasiswa yang pernah mengikuti program tersebut.

Peningkatan Hard dan Soft Skill Terhadap Mahasiswa

Kemendikbud Ristek menyebutkan bahwa tujuan dari diadakannya program MBKM adalah untuk meningkatkan hard dan soft skill mahasiswa agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Sebagian besar responden atau sekitar (75 %) setuju bahwa program MBKM dapat mencapai tujuan yang dicanangkan oleh Kemendikbud Ristek. Namun sebanyak (25%) menyatakan bahwa untuk mengetahui apakah program MBKM itu

memberikan hard dan soft skill kepada mahasiswa masih belum terukur dan memerlukan penelitian secara langsung kepada mahasiswa yang ikut dalam program MBKM tersebut.

Pendapat FN yang diamini oleh NN menyatakan: *“Kalau terkait hal ini ya perlu di teliti lagi karena ini kan semuanya program baru ya, jadi biasanya kalau para mahasiswa bercerita tentang MBKM ini kan enak-enak saja, akan tetapi ketika dilihat di lapangannya tidak sama dengan cerita yang senang-senang nya aja gitu, jadi untuk hal ini perlu diteliti lagi”*. Berkaitan dengan ini, peneliti juga setuju dengan FN dan NN, bahwa untuk membuktikan bahwa program MBKM itu memberikan manfaat yang besar berupa hard dan soft skill kepada mahasiswa, maka diperlukan penelitian khusus kepada para mahasiswa yang mengikuti program MBKM secara jujur dan terus terang.

Manfaat MBKM Terhadap Pemenuhan CPL

Endang Sulistiyani menyatakan bahwa “Kurikulum harus dapat mengakomodir kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman bekerja di lapangan tetapi juga mencapai capaian pembelajaran lulusan. Senada dengan Endang Sulistiyani, (Nanggala & Suryadi, 2021) menyebutkan bahwa guna menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan industri membutuhkan penyesuaian kurikulum. Menurut responden AR, *“Untuk CPL ya MBKM untuk CPL kalau di BKI belum melihat hubungan direct ya antara Bagaimana Program MBKM ini mempengaruhi CPL. Tapi begini, ketika mahasiswa BKI ikut otomatis kan ada konversi di mata kuliah tertentu ya, Dan kita mempertahankan tidak mengkonversi mata kuliah yang menjadi keahlian*. Pendapat AR diperkuat oleh FN bahwa *“Sama seperti yang tadi, perlu di teliti lagi ya, jadi kita perlu melihat terlebih dahulu mahasiswa ini dalam mengikuti MBKM apakah sudah sesuai dengan tujuan pemenuhan ini atau belum”*.

Sementara itu, responden lainnya menyebutkan bahwa MBKM dapat memperkuat dan memenuhi CPL seperti yang diharapkan oleh Kemendikbud Ristek. Hasil survei menunjukkan bahwa 25% dari responden berpendapat program MBKM belum bisa dikatakan telah memenuhi CPL khususnya jika program tersebut harus dikonversi dengan mata kuliah keahlian prodi. Untuk mengetahui tercapai atau tidaknya CPL, perlu dilakukan kajian yang komprehensif dan menyeluruh. Namun demikian

sebanyak 75 % menyatakan bahwa program MBKM dapat memenuhi CPL.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan hasil di atas, penulis menemukan bahwa implementasi kebijakan MBKM di Fakultas Psikologi dan Pendidikan Universitas Al Azhar Indonesia memerlukan persiapan yang matang agar kebijakan MBKM berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh Kemendikbud Ristek yang diturunkan ke setiap Perguruan Tinggi. Dari hasil wawancara diketahui bahwa jauh sebelum kebijakan MBKM diberlakukan, FPP telah melakukan beberapa program MBKM secara mandiri seperti program pertukaran mahasiswa dan program magang. Penelitian ini juga menemukan beberapa hal terkait implementasi MBKM dan kendala yang dihadapi.

Pertama Secara pelaksanaan, semua pejabat struktural mendukung kegiatan MBKM. Dikarenakan kegiatan MBKM merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU). Kedua, Adaptasi kurikulum menuju kurikulum MBKM masih mengalami kendala dan terus dilakukan perbaikan-perbaikan agar dapat selaras dengan program MBKM. Ketiga, Sulitnya mengkonversi program MBKM ke mata kuliah prodi, terutama mata kuliah yang menjadi keahlian. Keempat, Pembatasan kuota yang diberikan oleh Kemendikbud Ristek akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang ingin dicapai karena hanya sedikit yang bisa mengikuti program MBKM, ditambah dengan sulitnya mencari mitra kerja sama antar universitas. Terakhir, Perlu adanya penelitian yang melibatkan mahasiswa secara langsung, terkait dampak dari kegiatan MBKM. Tentunya hal ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan apakah kegiatan MBKM berdampak pada proses pembelajaran, dan meningkatkan *hard skill* maupun *soft skill* mahasiswa, dan apakah MBKM telah memenuhi CPL.

REFERENSI

- Arifin, S., & Muslim, M. (2021). Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 1-11.
- Astuti, S. Y., Rosiawan, R. W., & Suyitno. (2022). Student Responses to the Implementation of

- MBKM (Study on FEB Students who follow International Course Asia University). *International Journal of Educational Research & Social Sciences (IJERSC)*, 176-185.
- Dikti, D. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Jakarta.
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2020). *Panduan Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta.
- Dirjen Dikti. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2020). *Permendikbud No. 3, Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Jakarta.
- Lhutfi, I., & Mardiani, R. (2020). Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Policy: How Does It Affect the Sustainability on Accounting Education in Indonesia? *Dinamika Pendidikan*, 243-253.
- Nanggala, A., & Suryadi, K. (2021). Analisis Konsep Kampus Merdeka Dalam Perspektif Aliran Filsafat Pendidikan Progresivisme Dan Perennialisme. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan UNDIKSHA*, 14-26.
- Nofia, N. N. (2020). Analisis Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar Kampus Merdeka” Pada Perguruan Tinggi Islam Negeri Di Indonesia. *PRODU: Prokurasi Edukasi*, 61-72.
- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Parsons, W. (2005). *Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media.
- Puspitasari, R., & Nugroho, R. (2021). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fisip Upn Veteran Jawa Timur. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 276-292.
- Rodiyah, R. (2021). Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Digital dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum yang Berkarakter dan Profesional. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (pp. 425-434). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Sofaer, S. (1999). Qualitative methods: what are they and why use them? *Health Services Research*, 1101-1118.
- Sopiansyah, D., Masruroh, S., Zaqiah, Q. Y., & Erihadiana, M. (2021). Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). *Reslaj*, 34-41.
- Sulistiyani, E., Khamida, K., Soleha, U., Amalia, R., Hartatik, S., Putra, R. S., . . . Andini, A. (2022). Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Fakultas Kesehatan dan Non Kesehatan. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 686-698.
- Susilawati, N. (2021). Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme. *Sikola*, 203-219.
- Syah Aji, R. H., & Iswandi Putra, M. H. (2021). Role Model Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Program Studi Non-Agama. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2001-2010.
- Ulum, B., & Septayuda, T. (2022). Gambaran Kesiapan Mahasiswa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Al Azhar Indonesia: Studi Kasus Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri. *Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 83-88.
- Wahyuningtyas, R., Isyнуwardhana, D., Rismayani, R., & Gunawan, I. (2022). The Awareness and Implementation of MBKM Program as Flexible Learning in Faculty. *Humaniora*, 231-239.